

BEBAN BERAT APBN AKIBAT MEKANISME SUBSIDI ENERGI

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian berat, akibat mekanisme subsidi energi. Skema subsidi yang berbasis kuota disebut berimplikasi langsung pada munculnya biaya kompensasi ketika realisasi subsidi melewati batas kuota. Kemudian, konsekuensi dari mekanisme ini harus ditanggung APBN tahun berikutnya juga dalam bentuk biaya kompensasi. Hal ini akibat belum dibayarnya dana kompensasi di sejumlah BUMN oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga, diperlukan kejelasan mengenai keberlanjutan skema tersebut di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu). Pasalnya, harus ada sebuah kepastian apakah mekanisme ini nanti akan tetap digunakan, atau kemudian alokasi subsidi yang akan bersifat fluktuatif, naik dan turun. Meski demikian, subsidi energi dinilai masih belum tepat sasaran dan belum sepenuhnya dirasakan rakyat kecil. Bahkan, sebagian besar subsidi justru dinikmati kelompok mampu. Untuk pertalite misalnya, pemanfaatannya sebesar 86% yang masih dinikmati rumah tangga, sehingga ada indikasi kebocoran pemanfaatan subsidi yang kurang tepat. Padahal, total anggaran subsidi energi dan kompensasi pada 2025 senilai Rp 479 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding pada 2024 yang sebesar Rp 502 triliun. Semua itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Dalam kesempatan itu, Komisi XI mendorong agar pemerintah mendesain ulang penyaluran subsidi agar lebih presisi dan berbasis keadilan.

BACA HAL 11...

DELAPAN SUBSIDI ENERGI DAN NONENERGI:

- 1. SOLAR**
Harga keekonomian: Rp11.950/liter → harga jual: Rp6.800.
Subsidi: Rp5.150/liter (43%).
Total subsidi: Rp89,7 triliun untuk >4 juta kendaraan.

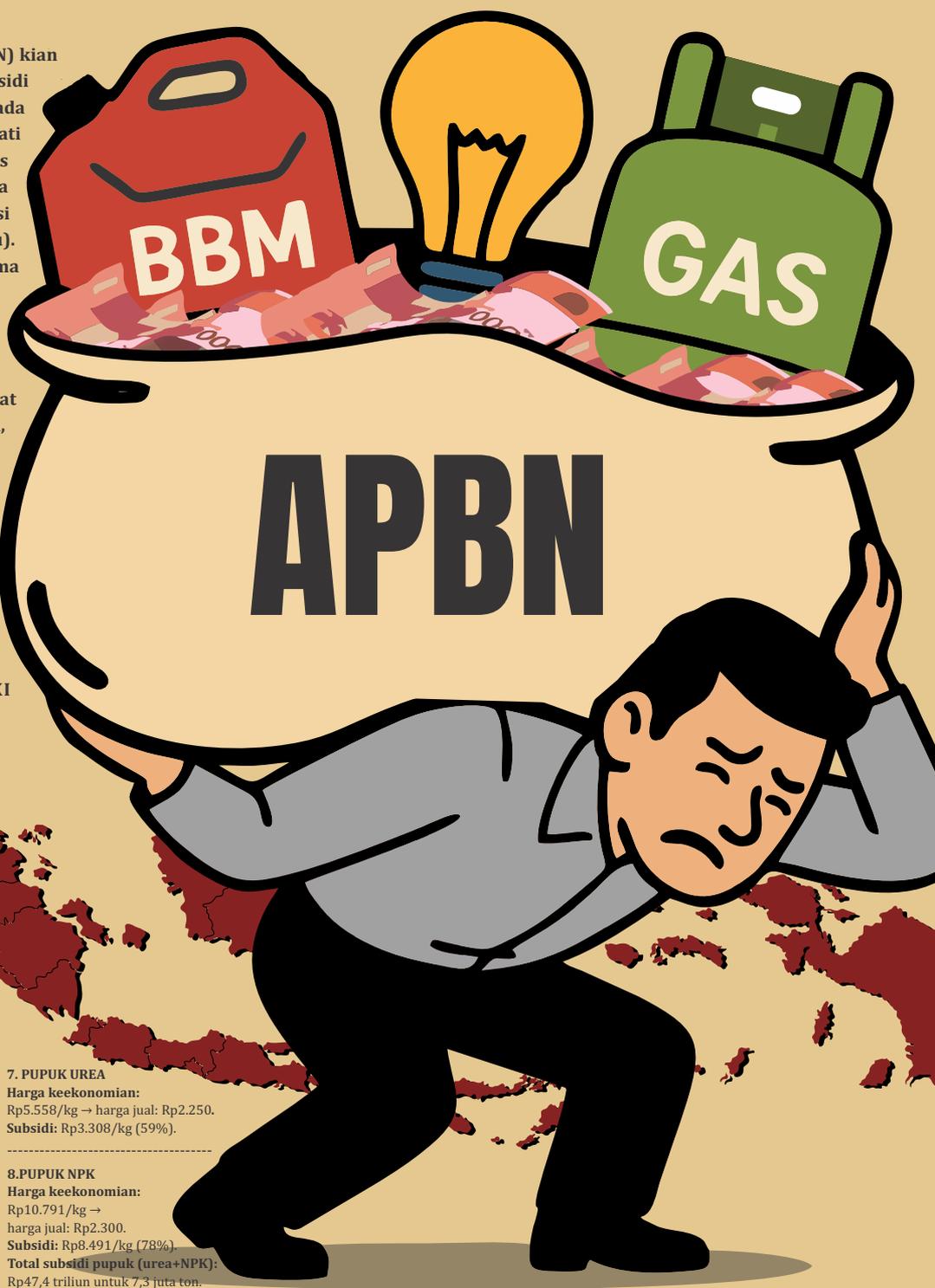
- 2. PERTALITE**
Harga keekonomian: Rp11.700/liter → harga jual: Rp10.000.
Subsidi: Rp1.700/liter (15%).
Total subsidi: Rp56,1 triliun untuk 157,4 juta kendaraan.

- 3. MINYAK TANAH**
Harga keekonomian: Rp11.150/liter → harga jual: Rp2.500.
Subsidi: Rp8.650/liter (78%).
Total subsidi: Rp4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga.

- 4. LPG 3 KG**
Harga keekonomian: Rp42.750/tabung → harga jual: Rp12.750.
Subsidi: Rp30.000/tabung (70%).
Total subsidi: Rp80,2 triliun untuk 41,5 juta pelanggan.

- 5. LISTRIK RUMAH TANGGA 900 VA BERSUBSIDI**
Tarif dari Rp1.800/kWh → Rp600/kWh.
Subsidi: Rp1.200/kWh (67%).
Penerima: 40,3 juta pelanggan.

- 6. LISTRIK RUMAH TANGGA 900 VA NONSUBSIDI**
Tarif dari Rp1.800/kWh → Rp1.400/kWh.
Kompensasi: Rp400/kWh (22%).
Penerima: 50,6 juta pelanggan.
Total subsidi listrik (5+6): Rp156,4 T



- 7. PUPUK UREA**
Harga keekonomian: Rp5.558/kg → harga jual: Rp2.250.
Subsidi: Rp3.308/kg (59%).

- 8. PUPUK NPK**
Harga keekonomian: Rp10.791/kg → harga jual: Rp2.300.
Subsidi: Rp8.491/kg (78%).
Total subsidi pupuk (urea+NPK): Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton.

DIMULAI 15 OKTOBER FRESH GRADUATE MAGANG DIBAYAR RP3,3 JUTA

Program magang bagi lulusan perguruan tinggi (fresh graduate), yang dibayar oleh pemerintah akan dimulai pada 15 Oktober 2025. Nantinya mereka akan mendapatkan honor oleh pemerintah sebesar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan.

“Jadi yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (30/9/2025).

Airlangga menjelaskan program itu masuk dalam salah satu dari 8 paket Akselerasi Ekonomi 2025 yang digulirkan pemerintah untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk pendaftaran program magang akan dimulai pada 15 Oktober. Nantinya para lulusan baru universitas wajib mendaftarkan dirinya di laman 'Siap Kerja', untuk verifikasi profil.

“Karena kita sudah punya data seluruh mahasiswa yang lulus satu tahun yang lalu, jadi sudah ada datanya dari Depdikbud (Kementerian Pendidikan Tinggi Sainstek dan Teknologi), sudah ada di server. Sehingga kalau mereka mendaftar secara on demand, itu sudah bisa di cross - check dengan data yang ada di perusahaan,” jelas Airlangga.

Kemudian honor yang diberikan pemerintah ini akan ditransfer langsung ke rekening Pribadi. Untuk itu Airlangga mendorong bagi peminat program ini untuk menggunakan rekening dari bank Himbara.

“Jadi nanti sesudah mereka mendaftar, diterima, nanti diumumkan kerja, nanti honor nya dikirim ke rekening masing-masing, dan diusulkan mereka mempunyai account bank Himbara,” sebutnya dilansir cnbcindonesia.

Dia juga memaparkan bahwa saat ini sudah banyak perusahaan yang mendaftar untuk menerima anak magang pada program ini, mulai dari BUMN hingga swasta.

Seperti diketahui, dari paket tersebut, anggaran senilai Rp198 miliar dialokasikan khusus untuk program magang pada tahun 2025, dan jumlah yang sama pada tahun

2026, dengan target 20.000 penerima manfaat.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa skema program pemagangan itu sudah difinalisasi. Nantinya pelaksanaan dilakukan dengan cara 2 fase.

Pertama, perusahaan membuka lowongan magang melalui platform Kemenaker. “Fasanya itu adalah perusahaan dulu yang kemudian akan mem-posting lowongan-lowongan, kami kasih waktu mungkin sekitar seminggu, setelah itu baru kemudian calon peserta itu memilih,” jelas Yassierli.

Soal jumlah perusahaan yang ikut serta, dia menegaskan tidak ada batasan. “Bebas. Syaratnya adalah mereka yang terdaftar memiliki izin usaha dan terdaftar di WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan),” ujarnya.

Adapun bagi perusahaan yang berminat, pendaftaran dilakukan langsung melalui platform Kemenaker.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai program magang berbayar bagi para lulusan baru (fresh graduate) dapat menjadi terobosan untuk menekan angka pengangguran.

“Program magang ini bisa jadi angin segar bagi para ‘fresh graduate’, yang sejauh ini bingung setelah wisuda mau cari kerja di mana dan mau kerja apa. Program ini membidik langsung sumber masalah yang setiap tahun menciptakan pengangguran baru. Saya percaya, dengan kebijakan seperti ini tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin turun secara signifikan,” kata Iwan dilansir antara Senin (15/9/2025).

Menurut Iwan, skema magang berbayar tersebut tak hanya membantu menurunkan angka pengangguran di kalangan muda, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Apalagi magangnya berbayar. Secara langsung, selain mengurangi pengangguran yang saat ini terbanyak di angkatan muda, juga bisa



Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (CNBC Indonesia)

mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kemudian disinergikan dengan program dan insentif lain,” tuturnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa manfaat program ini bergantung pada keseriusan peserta. “Tentunya kita berharap penerima manfaat bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Outputnya diharapkan menciptakan angkatan kerja yang berkompeten dan bisa bersaing. Dan kita juga berharap, program seperti ini tidak berhenti hanya hanya pada gelombang pertama, semoga akan ada gelombang-gelombang berikutnya,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., mengatakan program ini menyimpan dilema. Di satu sisi, ia dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Namun, di sisi lain, ada potensi eksploitasi terhadap para lulusan baru yang minim daya tawar.

“Anggapan para pemilik usaha bahwa fresh graduate pasti lebih murah dan tidak banyak menuntut membuka kemungkinan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Zuly Qodir.

Guru Besar Sosiologi UMY ini menambahkan, dalam relasi ketenagakerjaan, pekerja sering kali berada di posisi lemah di hadapan pemilik modal. Kondisi tersebut semakin berat karena serikat pekerja di Indonesia cenderung melemah, sehingga lulusan baru yang belum memiliki daya kritis menjadi kelompok paling rentan.

Meski program ini disebut “magang berbayar”, Zuly menegaskan perusahaan tidak boleh bertindak semena-mena. “Harus ada jaminan bahwa tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja, meskipun mereka hanya berstatus magang,” tegasnya dalam keterangan tertulis.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi sehat antara dunia usaha dan perguruan tinggi. “Dunia usaha memang membutuhkan tenaga

terampil, dan perguruan tinggi menyediakannya. Tetapi bukan berarti mereka bisa dibayar murah,” tambahnya.

Menurut Zuly, magang berbayar tetap bisa memberi manfaat jika ditempatkan sebagai sarana pembelajaran. Lulusan baru akan memperoleh pengalaman kerja, meski dengan penghasilan yang terbatas, sementara dunia usaha juga harus memahami bahwa tenaga magang belum sepenuhnya terampil.

“Pada akhirnya, perguruan tinggi harus menyiapkan lulusannya agar siap bersaing di dunia kerja, sekaligus memastikan mereka tidak jatuh dalam lingkaran eksploitasi,” pungkasnya. (han,ant,ist/lut)



Karena kita sudah punya data seluruh mahasiswa yang lulus satu tahun yang lalu, jadi sudah ada datanya dari Depdikbud (Kementerian Pendidikan Tinggi Sainstek dan Teknologi), sudah ada di server. Sehingga kalau mereka mendaftar secara on demand, itu sudah bisa di cross - check dengan data yang ada di perusahaan,”

**AIRLANGGA
HARTARTO**

Menko Perekonomian



Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. (Tempo)

KETUA KOMISI X DPR PASTIKAN TIDAK MENGHAPUS TUNJANGAN GURU

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa tidak akan menghapus tunjangan guru dalam Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tengah digodok parlemen. Pernyataan itu sebagai klarifikasi isu penghapusan tunjangan guru yang beredar di masyarakat.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa tidak akan menghapus tunjangan guru dalam Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tengah digodok parlemen. Pernyataan itu sebagai klarifikasi isu penghapusan tunjangan guru yang beredar di masyarakat.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memastikan tidak akan menghapus gaji dan tunjangan bagi guru. Menurut dia, gaji dan tunjangan guru yang sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Aturan itu akan kembali dimasukkan ke dalam RUU Sisdiknas versi Komisi X.

Politikus Golkar ini menuturkan draf tersebut belum rampung dan masih dalam proses penyusunan. "Jadi siapapun yang mengomentari draf RUU Sisdiknas dipastikan bukan mengomentari draf milik komisi X," kata Hetifah dalam keterangan tertulis

pada Selasa (30/9/2025).

Dalam draf yang masih belum dipublikasikan, Hetifah membocorkan DPR rencananya akan memasukkan aturan tentang gaji dan tunjangan guru ke dalam Pasal 135. "Intinya, Komisi X DPR RI, justru akan menambah pengaturan yang lebih menguntungkan bagi para guru," kata dia.

Sejumlah peraturan yang diklaim akan menguntungkan dan masuk dalam Pasal 135 itu ialah klausul bahwa guru dan dosen berhak mendapatkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain, seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan masalah tambahan.

Tunjangan profesi dalam RUU tersebut ditetapkan paling sedikit harus setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh pemerintah pusat pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Hetifah menekankan pihaknya sangat terbuka dengan masukan dan saran dari masyarakat terhadap rancangan RUU Sisdiknas tersebut. "Sehingga kebutuhan kesejahteraan guru dapat terpenuhi sesuai dengan beban tanggung jawabnya," kata dia.

Pembahasan RUU Sisdiknas ini masih terus bergulir. DPR menyepakati UU ini masuk ke dalam program legislasi 2025 dan berlanjut menjadi program prioritas pada 2026 jika belum rampung di tahun ini.

RUU Sisdiknas ini sebetulnya sudah pernah dibahas di parlemen pada 2022. Namun, ketika itu revisi UU Sisdiknas menuai polemik lantaran muncul wacana untuk menghapuskan klausul tunjangan profesi guru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kala itu ingin mengganti istilah tunjangan dengan penghasilan atau pengupahan bagi pendidik. Pembahasan pun tidak berlanjut hingga DPR periode jabatan 2019-2024 habis.

DPR periode 2024-2029 kemudian bersepakat memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas dalam

lima tahun menjabat. Anggota dewan rencananya akan melebur empat UU. Yaitu, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Hetifah membocorkan bahwa dalam draf omnibus law RUU Sisdiknas tersebut, ketentuan mengenai tunjangan guru dan dosen akan dimasukkan di Pasal 135. Berikut ini ketentuan Pasal 135 tersebut:

1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain.

2. Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Tunjangan profesi.
- b. Tunjangan fungsional.
- c. Tunjangan khusus.
- d. Masalah tambahan, yang terkait dengan tugas sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

3. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling sedikit setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh pemerintah pusat pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

4. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada guru yang diangkat oleh pemerintah pusat.

5. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru kepada guru yang bertugas di daerah khusus yang diangkat oleh pemerintah pusat pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

6. Masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengatakan bahwa gaji tunjangan guru tidak masuk dalam draft RUU Sisdiknas. Hal ini merupakan sebuah kemunduran karena gaji dan tunjangan guru sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Sedangkan di undang-undang guru dan dosen itu ada. Bayangkan bagaimana negara memandang guru itu bisa kelihatan dari situ," kata Unifah, dilansir Kompas.com, Senin (8/9/2025).

Unifah mengatakan, hal itu ia ketahui karena PGRI mendapatkan draf RUU Sisdiknas dan sudah ikut beberapa kali rapat untuk memberikan pandangan terkait RUU Sisdiknas. Saat ia lihat draf tersebut, ternyata tidak ada klausul soal tunjangan guru dan gaji guru di bagian batang tubuh RUU Sisdiknas.

"Jadi bisa dilihat bagaimana sekarang itu para petinggi itu tidak melihat bahwa guru itu sesuatu yang istimewa. Dianggapnya tuh guru itu menyulitkanlah," ungkapnya.

Unifah mengaku sudah melakukan rangkaian komunikasi agar tunjangan dan gaji guru bisa masuk dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Namun, kata Unifah, tidak ada respons berarti dari pemerintah dan DPR agar memasukkan klausul tunjangan dan gaji guru.

"Jadi tugasnya yang mulia itu hanya indah diucapkan. Begitu diuraikan dalam bentuk program dan masa depan. Mereka menganggapnya sebagai beban. Karena nilainya yang besar," tuturnya. (han,ist/lut)



Jadi siapapun yang mengomentari draf RUU Sisdiknas dipastikan bukan mengomentari draf milik komisi X. Intinya, Komisi X DPR RI, justru akan menambah pengaturan yang lebih menguntungkan bagi para guru,"

**HETIFAH
SJAIFUDIAN**

Ketua Komisi X DPR RI

Musibah Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

MENCUAT DUGAAN BANGUNAN TAK BERIZIN HINGGA KEGAGALAN KONSTRUKSI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa penyebab robohnya musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo merupakan kegagalan teknologi konstruksi. Sementara, Bupati Sidoarjo, Subandi, menyebut pihak ponpes diduga tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hingga berita ini dibuat Selasa (30/9/2025) malam proses evakuasi masih berlangsung dan total ditemukan 3 korban meninggal dunia.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, kejadian semacam ini termasuk kategori bencana akibat kegagalan teknologi, yang harus diantisipasi dengan penerapan standar keselamatan konstruksi secara ketat. "Masyarakat dan pengelola bangunan bertingkat diimbau untuk memastikan pengawasan teknis pembangunan agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima detikJatim, Selasa (30/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa BPBD Sidoarjo bersama Basarnas, BPBD Jawa Timur, dan Forkopimda Sidoarjo, dengan dukungan BPBD dari Surabaya, Gresik, Nganjuk, Mojokerto, Jombang, serta relawan SAR, terus melaksanakan operasi pencarian dan evakuasi hingga saat ini.

"Upaya asesmen lokasi kejadian, pemantauan struktur bangunan yang tersisa, serta penyiapan jalur evakuasi korban menjadi fokus utama tim di lapangan. Informasi perkembangan penanganan akan terus diperbarui seiring proses pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung," terangnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan, "Nanti akan kita sosialisasikan kembali, kalau ada pembangunan yang tidak dilengkapi izin, akan kita berhentikan dahulu, kita tidak ingin musibah ini terulang kembali," ujar Subandi dilansir detikJatim, Selasa (30/9/2025).

Subandi mengaku telah mencecar pihak ponpes soal izin bangunan itu. Dia menyebut tak ada izin untuk pembangunan serta pengerjaan konstruksi tidak sesuai standar.

"Ini saya tanyakan izin-izinnya mana, tetapi ternyata nggak ada, ngecor lantai tiga, karena konstruksi tidak standar, jadi akhirnya roboh," katanya.

Salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoziny, KH Abdus Salam Mujib, menyebut peristiwa musala ambruk itu terjadi saat proses pengecoran bagian paling atas bangunan. Menurutnya, pengecoran telah berjalan selama 9 bulan terakhir.

"Ini pengecoran yang terakhir saja. Itu jebol. Ya hanya itu," ujar Mujib.



Foto udara bangunan musala yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025).antara

Berikut hasil editan dan penataan ulang berita agar lebih detail, mengalir, dan tetap informatif:

Menag Singgung Aturan Pembangunan Pesantren

Menteri Agama Republik Indonesia (RI) KH Nasaruddin Umar meninjau langsung lokasi ambruknya mushala tiga lantai di Pondok

Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa tragis itu terjadi pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, saat para santri tengah menunaikan salat Ashar berjamaah.

Bangunan yang roboh tersebut menelan banyak korban. Sebagian santri berhasil dievakuasi, namun hingga Selasa (30/9/2025) petang, sejumlah

santri masih diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan bantuan alat berat dan tenaga relawan.

Menteri Agama tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB. Kehadirannya didampingi aparat setempat dan petugas penyelamat yang masih berjibaku di lapangan. Selain meninjau kondisi reruntuhan, Nasaruddin juga menyempatkan diri berdialog dengan pengurus ponpes.

Dalam keterangannya, ia menegaskan pentingnya penerapan aturan pembangunan fisik di lingkungan pesantren.

"Kami selaku Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan fisik pondok pesantren. Ke depan, kami berharap standar-standar konstruksi yang berlaku bisa diterapkan secara ketat agar musibah seperti ini tidak terulang," kata Nasaruddin. (wid,rls,ant/dya)

3 Santri Meninggal, Puluhan Masih Dicari

Korban luka akibat runtuhnya bangunan di Ponpes Al Khoziny, dievakuasi ke IGD RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo pada Senin (29/9/2025). Ist



JUMLAH santri korban meninggal akibat runtuhnya bangunan Asrama Putra Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo bertambah menjadi tiga orang. Sementara, puluhan santri lainnya mengalami luka-luka.

Data itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, total korban yang telah teridentifikasi sebanyak 100 orang hingga pukul

11.00 WIB, Selasa (30/9/2025).

"Rinciannya, pasien rawat inap sebanyak 26 orang, pasien telah kembali pulang sebanyak 70 orang, 1 orang pasien dirujuk dari RS Siti Hajjar ke RSI Sakinah Mojokerto, dan korban meninggal dunia sebanyak 3 orang," kata Khofifah.

Khofifah mengatakan proses evakuasi masih berlangsung.

Puluhan ambulans disiagakan jika ada korban yang berhasil dievakuasi. Sebab, diperkirakan masih ada puluhan korban di dalam reruntuhan gedung.

Proses evakuasi tidak menggunakan eskavator sementara waktu. Alasannya, kondisi reruntuhan bangunan saat ini belum memungkinkan menggunakan ekskavator.

"Proses evakuasi terus berlanjut

memberikan layanan kepada mereka yang masih bisa berkomunikasi di bawah reruntuhan. Termasuk memberikan oksigen dan air sehingga ada ketahanan tubuh juga deteksi monitor peralatan yang disiapkan," kata Khofifah.

Terkait kondisi wali santri yang saat ini sedang kalut menanyakan kondisi anaknya, Pemprov Jatim bersama pengasuh pondok membuka crisis center yang berada di lokasi pondok. Seorang wali santri, Hamidah Soetadji mengatakan keponakannya belum berhasil dievakuasi. Karenanya, dia masih menunggu kabar dari petugas.

"Namanya Muhammad Mufi Alfian, 16 tahun. Asal Surabaya. Belum ada kabar sampai sekarang. Kayaknya dia kemarin juga dalam kondisi puasa," ujar Hamidah.

Adapun pasien yang dirawat di RSUD RT Notopuro Sidoarjo sebanyak 40 orang. Sebanyak 8 orang masih dalam perawatan dan 30 orang sudah pulang. Dua pasien sisanya meninggal. (wid,rls,tmo/dya)

ANTREAN HAJI DISAMAKAN SE-INDONESIA: 26 TAHUN 4 BULAN

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengusulkan antrean jamaah haji disamakan di seluruh Indonesia menjadi 26 tahun 4 bulan. Ditegaskan, pembagian kuota haji yang setara merupakan amanah undang-undang.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) baru saja menggelar rapat kerja tertutup dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas pembagian kuota haji 2026. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan), ingin pembagian kuota tahun ini harus sesuai dengan aturan undang-undang.

"Tahun ini kita berusaha membagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satunya dengan menggunakan dasar antrian calon jamaah haji. Dengan menggunakan antrean itu, maka akan terjadi keadilan yang merata baik dari Aceh sampai Papua, antreannya sama, 26,4 tahun," ujar Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Irfan mengatakan dengan kebijakan tersebut, maka jamaah haji mendapat jatah antrean yang setara. Hal tersebut dilakukan agar jamaah haji di Indonesia mendapat hak yang sama.

"Nanti akan sama juga pemberian atau pembayaran nilai manfaat, sama, tidak ada perbedaan, ini berangkatnya, nunggunya 20 tahun, satunya nunggu 30 tahun tapi nilai manfaatnya kok sama. Dengan demikian tidak ada," kata Irfan..

Irfan berharap mendapat kepastian dari Komisi VIII DPR terkait usulan tersebut. Usulan itu sementara tengah ditampung di DPR.

"Mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan mendapat kepastian mana yang akan kita pakai," ujar Irfan.

Senada, Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa pembagian kuota haji per provinsi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dahnil menjelaskan bahwa BPK menyatakan pembagian kuota haji yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

"Terkait dengan kuota tadi, kami ingin merujuk undang-undang karena selama ini penetapan kuota per provinsi itu menjadi temuan BPK," kata Dahnil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Oleh karena itu, Kementerian Haji hari ini menyampaikan kepada Komisi VIII DPR RI agar kuota haji tahun 2026 tidak dibagi per provinsi seperti tahun-tahun sebelumnya.



Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf (kanan) dan Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). (ist)

Pihaknya mendorong agar pembagian kuota haji dilakukan berdasarkan aturan undang-undang. "Kita menetapkan kuota yaitu berdasarkan daftar tunggu," tutur Dahnil.

Dengan mekanisme pembagian kuota ini, tidak ada lagi jamaah haji yang menunggu panggilan untuk berangkat ke Mekah hingga 48 tahun atau lebih.

"Semuanya akan sama antre 26

tahun. Jadi itu intinya," ujar Dahnil. "Jadi kami, Pak Menteri dan teman-teman DPR ingin mendorong prinsip berkeadilan untuk seluruh jamaah haji," tambahnya.

Berdasarkan catatan, pada 2023, masa tunggu haji paling lama ada di Kabupaten Bantaeng dengan waktu tunggu 97 tahun, Kabupaten Sidrap 94 tahun, Kabupaten Pinrang 90 tahun, Kota Pare-Pare 86 tahun, dan Kabupaten Wajo 86 tahun. Lalu, Kota

Makassar 85 tahun, Kota Bontang 83 tahun, Kabupaten Jeneponto 83 tahun, Kabupaten Maros 79 tahun, dan Kabupaten Nunukan 79 tahun.

Wamen Dahnil Anzar mengungkapkan kuota haji 2026 terbagi pada kuota haji reguler dan haji khusus. (wid,rls,ant/dya)

MASA TUNGGU HAJI REGULER PER PROVINSI (PENDAFTARAN 2025)

Provinsi	Masa Tunggu	Estimasi Tahun
Aceh	34 tahun	2059
Sumut	20 tahun	2045
Sumbang	24 tahun	2049
Riau	26 tahun	2051
Kepulauan Riau	23 tahun	2048
Jambi	32 tahun	2057
Sumsel	23 tahun	2048
Lampung	23 tahun	2048
Bangka Belitung	27 tahun	2052
DKI Jakarta	18 tahun	2043
Banten	27 tahun	2052
Jabar	29-30 tahun	2054
Jateng	22 tahun	2047
DI Yogyakarta	22 tahun	2047
Jatim	34 tahun	2059
Bali	31 tahun	2056
NTB	46 tahun	2071
NTT	38 tahun	2063
Kalteng	31 tahun	2056
Kalsel	18 tahun	2043
Kaltim	30 tahun	2055
Kaltara	25 tahun	2050
Sulut	27 tahun	2052
Sulteng	27 tahun	2052
Sulsel	43 tahun	2068
Sultra	20 tahun	2045
Gorontalo	17 tahun	2042
Papua	15 tahun	2040
Maluku Barat Daya	11 tahun	2036

Libatkan Kejagung di Seleksi Pegawai

WAKIL Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengatakan lebih dari 400 nama calon pejabat dan ASN akan diseleksi untuk mengisi struktur kelembagaan baru di Kementerian Haji dan Umrah. Nama-nama itu bermigrasi dari sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Dalam melakukan proses seleksi, Dahnil menyebut, Kementerian Haji dan Umrah telah meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk memastikan aparatur haji yang bergabung memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

"Kami menginginkan adanya super tim di tubuh Kementerian Haji dan Umrah, mengingat agenda keumatan ini bersifat reguler dan krusial. Untuk itu, peran Kejaksaan dalam membantu proses screening dan tracking menjadi sangat penting dilakukan," ujar Dahnil saat

konferensi pers, di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

Selain itu, Dahnil menyebut bahwa Kejaksaan juga akan berperan dalam mengawal proses pengadaan layanan haji, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga penyediaan konsumsi dan kesehatan. Langkah ini, katanya, diambil untuk menutup peluang terjadinya kebocoran anggaran dan memastikan setiap kontrak layanan berjalan secara akuntabel.

"Kami ingin memastikan Kementerian Haji dan Umrah dibangun di atas fondasi integritas sehingga pelayanan kepada jamaah haji benar-benar optimal," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung upaya tersebut, baik melalui fungsi pengawasan, pendampingan hukum, maupun sistem pencegahan. Dia

menilai kerja sama ini penting sebagai model sinergi antar lembaga dalam menjaga akuntabilitas pelayanan publik.

Sekretaris JAM Intelijen, Sarjono Turin, menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan sejarah baru dalam pengelolaan haji karena untuk pertama kalinya aparat penegak hukum terlibat secara langsung dalam pengawasan dan pengawalan melekat penyelenggaraan haji.

"Ini menjadi sejarah baru pelibatan penegakan hukum dalam penyelenggaraan haji. Kejaksaan dapat melihat secara terbuka bagaimana proses pengadaan berjalan, sekaligus mendeteksi potensi kritis atau kebocoran dalam penyediaan layanan bagi jamaah haji di Arab Saudi. Dari situ, kami dapat memberikan rekomendasi pengawasan hingga pencegahan penyimpangan sejak dini," jelas Sarjono. (wid,rls,ant/dya)

Putus Rantai Penularan TBC, Pemkot Malang Target Temukan 3.000 Kasus di 2025



Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif. (Santi/Lentera)

MALANG- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mencatat temuan 1.800 kasus tuberkulosis (TBC) aktif hingga September 2025. Angka tersebut masih jauh dari target 3.000 kasus yang harus ditemukan sepanjang tahun ini.

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan target tersebut merupakan hasil

perhitungan prevalensi TBC oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan jumlah penduduk Kota Malang. "Kalau 3.000 ini kita dapat, artinya kita bisa memutus rantai penularan di satu keluarga ataupun di dalam komunitas tertentu," ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Husnul menambahkan, arah kebijakan dari pemerintah pusat me-nekankan agar pemerintah daerah lebih aktif. Serta lebih ketat dalam pengawasan penanganan TBC. Hal itu diharapkan dapat menekan beban TBC di daerah.

"Sejauh ini, kami sudah melakukan upaya penemuan kasus TBC secara aktif. Sampai kemarin sudah hampir 1.800 kasus. Sisa

waktu Oktober sampai Desember ini mudah-mudahan bisa mendekati target," katanya.

Menurutnya, capaian target temuan TBC penting agar dapat mencerminkan angka prevalensi riil di Kota Malang. Bila target tidak tercapai, menurutnya potensi rantai penularan akan tetap ada. Karena penderita yang tidak terdeteksi dapat menularkan penyakit di lingkungan keluarga maupun komunitas.

Untuk mempercepat identifikasi kasus tersebut, Husnul mengatakan, Dinkes Kota Malang tidak hanya melibatkan puskesmas dan rumah sakit, tetapi juga menggandeng organisasi non profit (NGO). Pihak-pihak yang terlibat diminta aktif memberikan laporan perkembangan kasus TBC di wilayah masing-masing.

"Setiap ada penderita positif TBC, kami lakukan investigasi kontak. Artinya, satu penderita minimal dilakukan pemeriksaan terhadap 15

orang yang berinteraksi dengan penderita, baik di keluarga maupun di tempat kerja," jelas Husnul.

Lebih lanjut, dijelaskannya, penentuan seseorang menderita TBC tidak bisa dilakukan hanya dari gejala. Diagnosis harus melalui serangkaian pemeriksaan medis, termasuk tes cepat molekuler (TCM) dengan sampel dahak.

Namun, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap gejala umum TBC. "Umumnya penderita mengalami batuk yang tidak selesai dalam kurun waktu dua sampai tiga minggu. Gejala tambahannya bisa nyeri dada, mual, atau bercak darah saat batuk," paparnya.

Husnul menambahkan, penularan TBC terjadi melalui udara atau airborne disease, sehingga sangat bergantung pada imunitas dan asupan nutrisi seseorang. Untuk pencegahan dini, vaksinasi BCG sudah diberikan sejak bayi berusia satu bulan. (Santi/Dya)

Mantan PMI Bingung saat Balik Kampung, Pemkab Malang Bakal Geber Pelatihan

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus mematangkan rencana pembentukan program Malang Migran Center (MMC). Salah satu kegiatannya adalah menggeber pelatih. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kebingungan setelah kembali dari luar negeri alias balik ke kampung halaman.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindarto, mengatakan keberadaan MMC tidak hanya akan mempermudah akses informasi bagi calon PMI. Tetapi juga menyediakan fasilitas pelatihan bagi mereka yang baru kembali ke tanah air.

"PMI yang pulang sering merasa bingung. Dengan adanya pelatihan, mereka bisa lebih mudah menentukan pilihan untuk melanjutkan hidup di daerah asal," ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Menurut Yudhi, dengan diberikan pelatihan, para purna PMI dapat memiliki bekal keterampilan baru untuk memulai usaha mandiri setelah

masa kontrak kerja berakhir.

Ia mencontohkan, sejumlah pelatihan yang bisa dipilih antara lain menjahit, tata rias, membatik, hingga usaha jasa lainnya. Program ini akan dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan berbagai lembaga pelatihan.

Yudhi menambahkan, selama ini sebagian besar pelatihan biasanya diberikan oleh perusahaan yang memberangkatkan PMI. Namun dengan adanya MMC, pemerintah daerah juga akan memiliki peran langsung dalam memberikan pembekalan keterampilan tersebut.

"Mereka yang sudah memiliki uang, maka bisa menggunakannya untuk modal usaha," katanya.

Selain pelatihan, MMC nantinya juga akan memprioritaskan tiga layanan utama. Yakni layanan keimigrasian, layanan BPJS Ketenagakerjaan, dan layanan pelatihan. Dengan sistem satu pintu, Yudhi berharap, calon PMI tidak perlu lagi bolak-balik mengurus administrasi di banyak instansi.

"Saat ada warga yang ingin berangkat ke luar negeri untuk bekerja, mereka tidak perlu lagi keluar masuk di banyak pintu. Cukup dengan satu pintu, semuanya dapat tertangani," terang Yudhi.

Disebutkannya, tahapan pembentukan MMC saat ini masih terus berproses. Pihaknya juga rutin berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri) melalui pertemuan daring untuk membahas draf nota kesepahaman kerja sama.

"Untuk tempat sudah disurvei, yaitu di gedung LTSA Disnaker Kabupaten Malang. Namun apakah akan tetap di situ atau berpindah, kami masih menunggu keputusan dari pusat," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menegaskan program ini sangat relevan mengingat besarnya jumlah PMI asal Kabupaten Malang.

(Ilustrasi) Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) Kabupaten Malang. (dok. Disnaker Kab Malang)



Berdasarkan data Disnaker setempat, rata-rata setiap tahun terdapat sekitar 12 ribu warga yang berangkat bekerja ke luar negeri.

Dari jumlah tersebut, potensi devisa yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Angka ini menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang melalui remitansi yang dikirim para PMI. (Santi/Dya)

PROPOSAL PERDAMAIAN TRUMP SOAL GAZA DIDUKUNG NETANYAHU

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap proposal perdamaian Gaza yang diajukan Presiden AS Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu saat konferensi pers bersama di Gedung Putih pada Senin (29/9/2025) waktu setempat.



Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjabat tangan dalam konferensi pers bersama di Ruang Makan Negara di Gedung Putih di Washington, DC, AS, Senin (29/9/2025). (Foto: Reuters)

“**S**aya mendukung proposal Anda untuk mengakhiri perang di Gaza yang mencapai tujuan perang kami,” kata Netanyahu, dikutip dari AFP, Selasa (30/9/2025)..

“Jika Hamas menolak proposal Anda, Pak Presiden, atau jika mereka seharusnya menerimanya dan kemudian melakukan segalanya untuk melawan, maka Israel akan menyelesaikan tugasnya sendiri,” lanjut Netanyahu.

Dalam proposal perdamaian yang diajukan Trump, yang mendapatkan dukungan dari sejumlah negara mayoritas Muslim dan Arab seperti Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Pakistan, serta Indonesia, menekankan beberapa hal, antara lain gencatan senjata segera, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, serta pembentukan otoritas transisi pascaperang yang akan dipimpin Trump sendiri.

Selain itu, proposal ini juga memperoleh dukungan dari negara-negara Barat yang telah mengakui Palestina, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Uni Eropa.

Trump menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, yang menurutnya akan “menyelesaikan tugasnya sendiri” jika Hamas menolak proposal perdamaian tersebut. Ia juga menegaskan bahwa perdamaian di Timur Tengah sudah berada sangat dekat dan menyebut pengumuman proposal itu sebagai salah satu momen terbesar dalam peradaban.

Meskipun Trump memuji Netanyahu sebagai seorang pejuang, ia mengaku cukup frustrasi terhadap Perdana Menteri Israel tersebut, terutama terkait serangan Israel di Qatar yang menargetkan pejabat tinggi Hamas. Selain itu, Trump menegaskan penolakannya terhadap rencana aneksasi Tepi Barat.

Dalam pertemuan di Gedung Putih, Trump menginstruksikan Netanyahu untuk melepon Perdana Menteri Qatar dari Oval Office, menyampaikan permintaan maaf atas serangan yang

terjadi, serta berjanji agar insiden serupa tidak terulang.

Salah satu poin utama dalam proposal perdamaian Trump adalah penempatan pasukan stabilisasi internasional sementara serta pembentukan otoritas transisi yang dipimpin oleh Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Tony Blair, meski masih kontroversial di Timur Tengah karena keterlibatannya dalam perang

Irak 2003, menyatakan dukungan terhadap proposal ini yang dianggapnya berani dan cerdas.

Konflik di Gaza yang berlangsung selama dua tahun ini bermula dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.219 orang. Serangan balasan Israel kemudian menewaskan 66.055 warga Palestina, mayoritas adalah warga sipil. (AFP, ist/nei)

Baliho Prabowo di Tel Aviv, Kemlu Angkat Bicara

KEMENTERIAN Luar Negeri Indonesia menanggapi kemunculan baliho besar di Tel Aviv yang menampilkan Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin dunia. Baliho tersebut merupakan bagian dari kampanye untuk menghentikan perang di Gaza. Selain Prabowo, tampak juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Kemunculan sosok Prabowo di antara para pemimpin dunia itu menarik perhatian publik. Hal ini karena Indonesia selama ini konsisten menegaskan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung di Jalur Gaza.

Kemlu RI menegaskan, posisi Indonesia tetap tidak berubah. “Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan maupun normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords ataupun inisiatif lain, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat,” demikian pernyataan resmi Kemlu, Selasa (30/9/2025).

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Menlu RI yang berulang kali menekankan bahwa setiap upaya perdamaian atau gagasan besar mengenai Israel harus dimulai dari pengakuan hak penuh bangsa Palestina atas kemerdekaan dan kedaulatannya.

Konteks ini juga berkaitan dengan gagasan perdamaian yang pernah dilontarkan Donald Trump saat menjabat Presiden AS. Melalui “Deal of the Century”, Trump mengusulkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan model kompromi teritorial dan normalisasi hubungan regional. Namun, rencana itu banyak menuai kritik karena dianggap lebih menguntungkan Israel dan belum menyentuh tuntutan utama rakyat Palestina, yakni pengakuan sebagai negara berdaulat.

Bagi Indonesia, visi perdamaian semacam itu hanya bisa dianggap relevan apabila prinsip dasar pengakuan kemerdekaan Palestina dijadikan titik awal. Karena itu, meski nama Presiden Prabowo Subianto muncul di baliho kampanye Tel Aviv, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan perubahan sikap

ISI 21 POIN RENCANA TRUMP

- Gaza jadi zona bebas radikalisis/teror.
- Gaza dibangun kembali demi rakyat.
- Jika disetujui, perang dihentikan, IDF tarik pasukan.
- Sandera dikembalikan dalam 48 jam.
- Israel bebaskan tahanan & kembalikan jenazah setelah sandera pulang.
- Hamas damai diberi amnesti atau jalur keluar aman.
- Bantuan minimal 600 truk/hari masuk.
- Distribusi bantuan dikelola PBB & lembaga internasional.
- Gaza dipimpin pemerintahan transisi teknokrat Palestina, diawasi internasional.
- Program ekonomi disiapkan untuk investasi & lapangan kerja.
- Zona ekonomi khusus dengan tarif rendah.
- Tidak ada pemaksaan keluar Gaza; yang pergi bisa kembali.
- Hamas dilarang ikut pemerintahan, infrastruktur militer dihancurkan.
- Keamanan dijamin mitra regional.
- Pasukan stabilisasi internasional masuk, latih polisi Palestina.
- Israel tidak menduduki/anneksasi Gaza, serahkan ke pasukan internasional.
- Jika Hamas menolak, rencana tetap jalan di wilayah bebas teror.
- Israel setuju tak serang Qatar; Doha diakui sebagai mediator.
- Program deradikalisasi lewat dialog lintas agama.
- Rekonstruksi Gaza & reformasi PA membuka jalan negara Palestina.
- AS fasilitasi dialog Israel-Palestina untuk perdamaian.

resmi negara.

Selain itu, Indonesia sejauh ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, yang artinya tidak mengakui negara Yahudi tersebut. Sebaliknya, Indonesia telah bertahun-tahun silam mengakui Negara Palestina. (VOI, Bloomberg, ist/nei)

Kenali Bakteri Superbug yang Menyerang di AS

Fenomena superbug tengah diperbincangkan oleh banyak orang. Hal ini karena kasus superbug sedang meningkat di AS, bahkan disebut-sebut berpotensi menjadi pandemi baru. Namun, apakah sebenarnya superbug itu dan apakah bahayanya bagi kesehatan?

Superbug adalah istilah untuk mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, yang sudah kebal atau resisten terhadap obat-obatan. Hal ini menyebabkan pengobatan infeksi menjadi kurang atau bahkan tidak efektif sama sekali.

Hingga saat ini, superbug belum dinyatakan sebagai pandemi. Namun, superbug sudah menjadi salah satu kasus yang mendapatkan perhatian khusus oleh badan kesehatan dunia (WHO). Soalnya, infeksi ini dapat menyebabkan sakit yang lebih parah, meningkatkan biaya perawatan, bahkan meningkatkan risiko terjadinya kematian.

Penyebab Superbug

Disampaikan dr. Theresia Rina Yunita, superbug adalah strain bakteri dan jamur yang kebal atau resisten terhadap sebagian jenis antibiotik dan antijamur. Padahal, antibiotik adalah obat yang paling sering diresepkan untuk melawan penyakit

infeksi akibat bakteri, seperti pada kasus radang tenggorokan, diare, atau infeksi telinga. Sementara antijamur adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur. "Beberapa contoh superbug, termasuk bakteri resisten yang dapat menyebabkan infeksi kulit, infeksi saluran kemih, dan pneumonia," ungkap dr. Theresia.

Adapun jamur yang bisa menjadi superbug, yaitu *Candida auris*. Ini adalah jamur yang menyebabkan infeksi pada mulut, kulit, dan kelamin. Jika tidak ditangani dengan tepat, infeksi *Candida auris* dapat menimbulkan kematian. Setiap bakteri dan jamur sebenarnya berpotensi berubah menjadi superbug. Infeksi superbug makin umum terjadi karena penggunaan antibiotik dan antijamur yang tidak tepat.

Contohnya ketika kamu minum antibiotik ataupun antijamur untuk mengatasi infeksi virus saat terkena flu. Antibiotik dan antijamur jelas tidak dapat menghancurkan virus.

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat justru mematikan berbagai macam bakteri di dalam tubuh kamu, termasuk bakteri baik yang membantu tubuh mencerna makanan, mel

wan infeksi, dan mendukung kesehatan tubuh. Kondisi serupa juga bisa terjadi ketika kamu tidak menghabiskan seluruh antibiotik maupun antijamur yang diresepkan dokter sehingga bakteri dan jamur tidak sepenuhnya mati. Bakteri dan jamur yang tersisa adalah strain yang telah berevolusi, beradaptasi, dan bertahan hidup dari antibiotik dan antijamur yang digunakan. Jamur dan bakteri superbug dapat terus berkembang dan menyebar sehingga obat-obatan menjadi kurang efektif untuk melawan bakteri dan jamur penyebab penyakit tertentu.

Oleh karena itu, makin sering kamu menggunakan antibiotik yang tidak sesuai resep, maka kamu makin rentan mengalami resistensi antibiotik dan resistensi antijamur sehingga mudah terinfeksi superbug.

Dokter There menambahkan superbug juga bisa terjadi akibat pencegahan dan pengendalian infeksi yang buruk, hidup atau bekerja dalam kondisi yang tidak bersih, dan pengolahan makanan yang tidak tepat.

Gejala Superbug

Pada sebagian orang, infeksi superbug tidak menimbulkan gejala apa pun. Kondisi ini justru berbahaya karena tanpa disadari penderita dapat menularkan bakteri atau jamur resisten tersebut kepada orang lain, terutama mereka yang lebih rentan terhadap infeksi.

Sementara itu, pada kasus yang menimbulkan gejala, tanda-tanda infeksi superbug bisa bervariasi tergantung pada jenis bakteri atau jamur yang menginfeksi. Gejala umum yang sering muncul antara lain batuk, demam, pegal-pegal, diare, serta rasa

lelah yang berkepanjangan.

Secara umum, gejala infeksi superbug menyerupai infeksi bakteri atau jamur pada umumnya. Namun, perbedaannya terletak pada ketidakmampuan antibiotik maupun antijamur biasa untuk mengatasi penyakit ini. Dengan kata lain, meskipun pengobatan standar telah diberikan, gejala tetap tidak membaik.

Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan pemeriksaan medis jika mengalami gejala yang tidak kunjung reda meskipun sudah menjalani pengobatan.

Diagnosis tepat dan pengobatan yang sesuai dari tenaga medis profesional menjadi kunci utama untuk mencegah kondisi semakin parah sekaligus meminimalkan risiko penyebaran superbug kepada orang lain.

Cara Mencegah

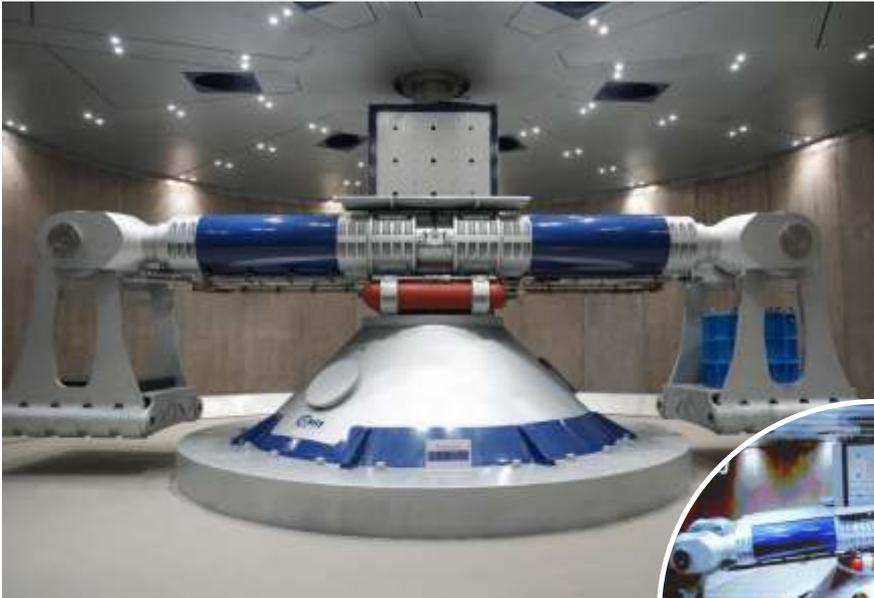
Menurut jurnal *The Lancet*, infeksi superbug telah menyebabkan sekitar 1,27 juta kematian secara global pada tahun 2019. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi pandemi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengambil langkah pencegahan agar terhindar dari paparan superbug.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, memastikan penggunaan air bersih, menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit, memasak makanan hingga benar-benar matang serta memisahkannya dari bahan mentah, menggunakan antibiotik maupun antijamur sesuai resep dokter, melengkapi vaksinasi, dan menjalani hubungan seksual yang aman dengan kondom. Jika muncul kecurigaan terinfeksi superbug, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter, baik secara langsung maupun melalui layanan medis daring.

Apabila seseorang terinfeksi, metode pengobatan akan disesuaikan dengan jenis bakteri atau jamur penyebab infeksi. Dokter biasanya mengirim sampel ke laboratorium untuk menentukan jenis antibiotik atau antijamur yang efektif. Jika setelah menjalani pengobatan gejala tidak menunjukkan perbaikan, pasien disarankan segera mendatangi rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lanjutan. (nei,ist/dya)



China Luncurkan Sentrifus Kapasitas 300 Kali Gravitasi Bumi



China pada Senin (29/9/2025) meresmikan sentrifus dengan kapasitas terbesar di dunia, mampu menghasilkan gaya hingga 300 kali gravitasi Bumi dan menahan beban seberat 20 ton.

Perangkat yang dinamai CHIEF1300 ini menjadi bagian penting dari Fasilitas Eksperimen Interdisipliner dan Hipergravitasi Sentrifugal (CHIEF) yang tengah dibangun di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok timur.

Sentrifus ini dapat digunakan untuk penelitian canggih, termasuk ekstraksi sumber daya dari laut dan bumi dalam, mitigasi serta pencegahan bencana, pengelolaan limbah bawah tanah, dan pengembangan material baru.

Dikembangkan oleh Universitas Zhejiang, fasilitas CHIEF dilengkapi dengan tiga sentrifus serta 18 perangkat penerbangan yang

mendukung enam kabin eksperimental. Selain itu, dua sentrifus tambahan dengan kapasitas lebih besar saat ini sedang dalam proses konstruksi.

Hipergravitasi merujuk pada kondisi di mana gaya gravitasi lebih besar dibandingkan gravitasi di permukaan Bumi. Sebagai gambaran, seorang penumpang roller coaster sesaat merasakan gravitasi dua kali lipat gravitasi Bumi, sementara seorang astronot saat peluncuran dapat mengalami lebih dari lima kali gravitasi (5G). Sementara itu, fasilitas CHIEF dirancang untuk menahan percepatan hingga 1.500G, menurut para perancangannya.

"Dalam medan hipergravitasi, para peneliti dapat mensimulasikan

bencana hidrogeologi dunia nyata, evolusi geologi, dan lingkungan ekstrem dalam model skala laboratorium dalam jangka waktu yang wajar," ujar Chen Yunmin dari Universitas Zhejiang, kepala ilmuwan di fasilitas tersebut.

Dalam kondisi ekstrem tersebut, CHIEF berfungsi seperti kompresor ruang-waktu. Contohnya, pada percepatan 100G, model berskala 1 meter dapat meniru peristiwa yang terjadi pada skala 100 meter, sehingga perjalanan kontaminan yang seharusnya berlangsung satu abad di lapangan dapat dipadatkan menjadi hanya 3,65 hari di laboratorium.

Di ruang mesin CHIEF 1300, sebuah ruang bawah tanah melingkar seluas 230 meter persegi, lengan raksasa dengan jari-jari 6,4 meter berputar dengan kecepatan tinggi untuk menghasilkan gravitasi ekstrem melalui gaya sentrifugal. Semakin cepat lengan tersebut berputar, semakin besar pula percepatan sentrifugal yang dihasilkan.

"CHIEF1300 ditempatkan di bawah permukaan tanah, dan dilengkapi dengan sistem vakum dan pendingin dinding untuk mengurangi pengaruh buruk hambatan udara dan pemanasan mesin," ujar kepala teknis fasilitas tersebut, Ling Daosheng, dari Universitas Zhejiang. Uji coba fasilitas ini telah menghasilkan

berbagai temuan baru. Para peneliti mensimulasikan gempa bumi besar untuk mengevaluasi kinerja seismik fondasi bendungan pembangkit listrik tenaga air,

Serta menilai dampak gelombang setinggi 4 meter dan tsunami setinggi 20 meter terhadap dasar laut sebagai acuan dalam pemilihan lokasi ladang angin lepas pantai. Analisis ini penting untuk memastikan ketahanan infrastruktur energi terhadap bencana alam sekaligus meminimalkan risiko kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian besar.

Studi semacam ini juga membantu memahami bagaimana dinamika laut dalam memengaruhi stabilitas struktur buatan manusia, sehingga desain yang dihasilkan dapat lebih tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga meniru tekanan laut dalam pada kedalaman 2.000 meter untuk menilai ekstraksi dan keamanan hidrat metana, sumber energi potensial yang dipandang sebagai cadangan masa depan.

Dengan meneliti kondisi ekstrem ini, para peneliti berusaha mencari metode yang aman dan efisien untuk memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

Seiring dengan itu, mereka juga mensintesis paduan logam dengan cacat minimal namun memiliki kekuatan dan keuletan tinggi, yang nantinya bisa diaplikasikan tidak hanya pada industri maritim, tetapi juga pada bidang teknologi kedirgantaraan, konstruksi, hingga manufaktur canggih. Chen menyatakan bahwa fasilitas ini akan berfungsi sebagai pusat penelitian terbuka dan kolaboratif untuk sains mutakhir, dengan harapan dapat bekerja sama dengan kelompok riset. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Mix and Match Kemeja Putih Anti Boring

Kemeja putih merupakan salah satu busana andalan yang digemari banyak orang. Alasannya sederhana: mudah dipadukan, sesuai untuk berbagai kesempatan, dan tidak pernah lekang oleh tren. Namun, jika hanya dikenakan dengan gaya yang sama secara terus-menerus, tentu akan terasa membosankan.

Oleh karena itu, inilah saat yang tepat untuk memberikan sentuhan baru pada penampilan. Dengan sedikit kreativitas, kemeja putih yang semula tampak polos dapat diolah menjadi fashion statement yang segar. Penampilan pun akan terlihat lebih menarik sekaligus meningkatkan rasa percaya diri.

Agar tidak bingung, terdapat beragam inspirasi gaya yang dapat dicoba. Mulai dari tampilan kasual hingga semi-formal, semuanya dapat diwujudkan dengan kemeja putih. Bahkan, ide-ide tersebut juga sangat cocok bagi pengguna hijab, sehingga tetap dapat tampil modis tanpa mengurangi kenyamanan.

Kemeja Putih dengan Vest

Apabila merasa busana yang dikenakan terlihat terlalu sederhana, salah satu cara mudah untuk memberikan sentuhan berbeda adalah dengan menambahkan vest di atas kemeja putih. Paduan ini tidak hanya membuat tampilan terlihat lebih rapi, tetapi juga menambahkan elemen gaya yang lebih berkarakter.

Pilihan vest rajut sangat tepat untuk memberikan kesan santai dan kasual, sehingga cocok dikenakan saat acara nonformal. Sementara itu, long vest dengan potongan elegan mampu menciptakan tampilan yang lebih modern dan profesional, sesuai untuk kegiatan formal maupun semi-formal.

Dengan memadukan kemeja putih dan vest, gaya berhijab tetap bisa terlihat fashionable tanpa mengurangi kesan sopan. Kombinasi ini juga membantu menciptakan variasi dalam penampilan sehari-hari, sehingga tidak terasa monoton sekaligus tetap mengikuti tren masa kini.

Kemeja Putih dengan Cardigan

Memerlukan busana yang nyaman namun tetap rapi? Kemeja putih dapat dipadukan dengan cardigan sebagai pilihan yang tepat. Paduan ini mampu menciptakan tampilan yang praktis, sekaligus menghadirkan nuansa hangat dan elegan. Pemilihan cardigan dengan detail menarik akan memberikan sentuhan tambahan sehingga penampilan terlihat lebih berkarakter.

Cardigan dengan desain sederhana dapat memberikan kesan kasual yang cocok untuk aktivitas sehari-hari, sementara cardigan dengan motif atau potongan unik dapat membuat penampilan tampak lebih segar dan berbeda. Dengan demikian, gaya yang tercipta tidak hanya nyaman dipakai, tetapi juga tetap sesuai dengan selera busana masa kini.

Kombinasi kemeja putih dan cardigan sangat ideal digunakan untuk kegiatan santai, seperti berkumpul bersama teman atau menghadiri acara nonformal.

Kemeja Putih dengan Culottes

Bagi Anda yang aktif dan membutuhkan busana nyaman, celana kulot merupakan pilihan yang tepat. Dengan potongan lebar, kulot memberikan keleluasaan bergerak sehingga ideal bagi perempuan berhijab yang memiliki banyak aktivitas.

Padukan kemeja putih dengan kulot berwarna netral untuk menciptakan tampilan yang rapi sekaligus modern. Kombinasi ini menghadirkan kesan anggun dan kekinian tanpa mengurangi

kenyamanan.

Kemeja Putih dengan Pleated Pants

Apabila Anda menginginkan tampilan feminin dan anggun tanpa perlu repot, memadukan kemeja putih dengan celana pleated dapat menjadi pilihan yang tepat. Detail lipit pada celana ini mampu memberikan kesan berkelas dan elegan pada penampilan. Kombinasi tersebut akan terlihat semakin menawan apabila disempurnakan dengan hijab berwarna senada. Dengan gaya ini, Anda dapat tampil anggun sekaligus modern dalam berbagai kesempatan.

Kemeja Putih dengan Rok Celana

Apabila Anda menginginkan tampilan feminin layaknya menggunakan rok namun tetap nyaman untuk bergerak, memadukan kemeja putih dengan rok celana dapat menjadi pilihan yang tepat.

Paduan ini menghadirkan kesan anggun sekaligus manis tanpa mengurangi kenyamanan. Selain itu, kombinasi kemeja putih dan rok celana juga mendukung mobilitas tinggi. Karena sifatnya yang praktis, gaya ini kerap menjadi andalan busana hijab sehari-hari.

Kemeja Putih dengan Ruffle Skirt

Apabila ingin menampilkan gaya yang lebih feminin dan lembut, memadukan kemeja putih dengan rok ruffle merupakan pilihan yang tepat. Kombinasi ini menghadirkan kesan manis dan anggun tanpa perlu usaha berlebih, sehingga cocok untuk berbagai kesempatan santai maupun semi formal. (nei,ist/dya)



Kemeja Putih & Cardigan



Kemeja Putih & Culottes



Kemeja Putih & Layered Palazzo Pants

Beban Berat APBN, ...dari hal 1

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan setiap BUMN yang menjalankan public service obligation (PSO) berhak atas dana kompensasi dari Kemenkeu. "Bagaimana pengelolaan subsidi dan kompensasi ini, dan realisasinya? Saya ingin seluruh rekan-rekan untuk memperhatikan dan membandingkan dengan apa yang disampaikan BUMN soal BSU (Bantuan Subsidi Upah), semalam. Karena banyak sekali dari mereka yang kompensasi 2024-nya, belum dibayar," ujar Misbakhun dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Misbakhun meminta penjelasan kepada Menkeu Purbaya terkait perbedaan kompensasi yang belum terbayarkan pada 2024. Tak hanya itu, politikus Partai Golkar ini, berdasarkan laporan yang diterima, alokasi subsidi pada 2025 juga belum sepenuhnya dijalankan.

"Rapat semalam di APBN semuanya sudah teralokasikan, bahkan pencairannya pun melalui mekanisme yang rigid, ketat dan teraudit," jelas dia.

Tak hanya itu, Misbakhun menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tak adanya prosedur dalam penerimaan BSU.

"Banyak temuan BPK dalam laporan keuangan pemerintah pusat seringkali ditemukan kejadian yang berulang, terkait pengelolaan BSU. Misalnya, belum adanya prosedur dan standar operasional yang diterapkan," jelas dia.

Dia juga mengatakan skema subsidi yang berbasis kuota ini berimplikasi langsung pada munculnya biaya kompensasi ketika realisasi subsidi melewati batas kuota. Di mana, APBN di tahun berjalan harus bertanggung jawab terhadap subsidi di tahun sebelumnya dalam bentuk biaya kompensasi.

"Karena kompensasi dan subsidi itu grafiknya sama, hanya penyebutan komponennya yang berbeda dalam APBN," ungkap Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan (Menkeu), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Probolinggo-Pasuruan ini memaparkan data terbaru mengenai kompensasi listrik. Ia menjelaskan bahwa kompensasi kuartal pertama PLN mencapai Rp27,6 triliun, yang mencerminkan beban subsidi tahun 2024 yang belum terbayarkan dan akan menjadi biaya kompensasi di tahun 2025.

Selain kompensasi yang menumpuk, legislator Komisi XI tersebut juga menyoroti tunggakan lain yang belum diselesaikan, di antaranya diskon listrik sekitar

Rp13,6 triliun serta kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar Rp3,82 triliun. Ia meminta pemerintah mengecek kembali data tersebut karena ada indikasi belum seluruh kewajiban subsidi dibayarkan.

Terakhir, Anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini pun menegaskan bahwa penekanan ini bukan dimaksudkan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, khususnya terkait kewajiban pemerintah terhadap BUMN yang menjalankan tugas pelayanan publik (PSO). "Kita ingin memperbaiki tata kelola. Jangan sampai. BUMN-BUMN yang mendapatkan tugas PSO, kemudian kewajiban finansialnya tidak segera ditunaikan," pungkasnya.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menilai subsidi energi masih belum tepat sasaran dan belum sepenuhnya dirasakan rakyat kecil. Ia mencontohkan, pedagang kecil dan pekerja lepas mengaku subsidi dan stimulus yang diberikan pemerintah tidak banyak membantu kebutuhan sehari-hari.

"Subsidi dan stimulus itu ada tapi dampaknya belum terasa di dapur-dapur kami. Harga BBM mempengaruhi ongkos antar jemput dan bahan pokok. Sementara listrik rumah tangga kecil masih susah saat bayar tagihan," ujar Habib Idrus dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan (Menkeu), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menambahkan, sebagian besar subsidi justru dinikmati kelompok mampu. Untuk pertalite misalnya, Habib Idrus menyoroti pemanfaatannya sebesar 86% yang masih dinikmati rumah tangga. Ia mengindikasikan masih adanya indikasi bocoran pemanfaatan subsidi yang kurang tepat. Tak pelak, Idrus pun mendorong agar pemerintah mendesain ulang penyaluran subsidi agar lebih presisi dan berbasis keadilan.

"Subsidi tidak bisa dibagi rata, melainkan adil dan berbasis kebutuhan anak yang paling rapuh. Mekanisme teknis harus diarahkan ke kuintil terbawah dengan integrasi data DTKS, Regsosek, dan ID kependudukan untuk meminimalkan exclusion error," paparnya.

Menurutnya, subsidi energi yang berbiaya besar seharusnya memberi manfaat maksimal bagi kelompok paling rentan. Ia menekankan pentingnya presisi agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat terbawah.

"Subsidi ini bukan untuk memanjakan, melainkan investasi agar rakyat kecil bisa tumbuh mandiri di masa depan. Maka pemerintah harus memastikan kebijakan benar-benar melindungi mereka yang paling membutuhkan," pungkash Habib Idrus.

Sementara itu, merespons

pernyataan dari Misbakhun, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kompensasi tahun 2024 telah dibayarkan penuh. Mengenai adanya perbedaan realisasi, dia meminta agar BUMM segera menemuinya.

"Setahu saya, (kompensasi) yang 2024, sudah dibayarkan semuanya. Nanti kalau mereka mengklaim belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya. Tapi data yang kami miliki, seperti itu," ungkap Menkeu Purbaya.

"Memang data 2025 belum ada yang dibayarkan di triwulan I, ke II. Akan tetapi kami mengikuti prosedur yang sedang berjalan. Nanti, bulan Oktober untuk triwulan I ke II akan kita bayarkan penuh. Tolong BUMN-nya menghadap kami, pak," tegas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menekeu), Purbaya Yudhi Sadewa, merinci harga asli barang-barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg) sebelum selisih harga keekonomian dan yang dibayar masyarakat ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Terdapat delapan jenis barang energi maupun nonenergi yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh pemerintah.

Pertama, solar yang seharusnya berharga Rp11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp6.800 per liter. Artinya, sebesar Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen dari harga asli ditanggung oleh APBN.

Untuk tahun anggaran 2024, total nilai subsidi solar mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan.

Kedua, Pertalite dengan harga seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.

Ketiga, minyak tanah seharusnya berharga Rp11.150 per liter, namun dijual kepada masyarakat dengan harga Rp2.500 per liter, disubsidi Rp8.650 per liter (78 persen) dengan realisasi anggaran Rp4,5 triliun. Subsidi minyak tanah disebut memberikan manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.

Keempat, LPG 3 kg memiliki harga asli Rp42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp12.750 per tabung, atau disubsidi sebesar Rp30.000 (70 persen). Subsidi tersebut memakan anggaran Rp80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.

Kelima, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga 900 VA dari seharusnya Rp1.800 per kWh menjadi Rp600 per kWh. Pemerintah menanggung Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga asli, dan subsidi tarif listrik tersebut dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan.

Keenam, masih dari sektor listrik, yakni listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi mendapatkan kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), sehingga menurunkan biaya dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp1.400 per kWh dan dimanfaatkan oleh 50,6 juta pelanggan. Nilai subsidi untuk sektor listrik mencapai Rp156,4 triliun pada APBN 2024.

Ketujuh, pemerintah menanggung biaya pupuk urea sebesar Rp3.308 per kg, sehingga menurunkan harga dari seharusnya Rp5.558 per kg menjadi Rp2.250 per kg (subsidi 59 persen).

Terakhir yaitu ke delapan, pupuk NPK yang seharusnya berharga Rp10.791 per kg, dijual kepada petani dengan harga Rp2.300 per kg atau disubsidi sebesar Rp8.491 per kg (78 persen). Nilai subsidi pupuk pada APBN 2024 mencapai Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk kepada petani.

"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," kata Purbaya.

Kemudian, dalam rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu maka ada lima poin kesepakatan untuk menjawab permasalahan tersebut. Salah satunya ialah percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke BUMN penugasan dari semula prosesnya memakan waktu 3 bulan menjadi hanya 1 bulan.

"Dengan disetujuinya kesimpulan ini maka menteri keuangan sudah sepakat dan ini menjadi kesimpulan raker kita hari ini. Ini luar biasa, rapatnya cepat, jawabannya cepat, responsnya cepat ini," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun se usai mengetuk palu sidang penutup rapat kerja.

Purbaya mengatakan, juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran anggota dewan di Komisi XI DPR telah mendukungnya dalam proses percepatan pembayaran utang-utang kompensasi pemerintah ke BUMN penugasan, seperti ke Pertamina hingga PLN.

"Tapi terus terang ini sudah menjadi pikiran saya cukup lama kenapa ditunda, kalau ditunda kan cost of capitalnya tinggi perusahaan-perusahaan itu. Akhirnya mereka untungnya berkurang sementara pemerintah bisa bilang oke subsidi saya aman atau anggaran saya aman," ucap Purbaya.

"Kan harusnya enggak begitu, setelah kita memberikan tugas kepada suatu badan usaha harusnya kewajiban pemerintah juga dipenuhi tepat waktu sehingga tidak ganggu badan usaha tersebut," tuturnya.5. (han,rls,ant,ist/lut)

KASUS KORUPSI BANK BJB

KPK KEMBALI PERIKSA ILHAM HABIBIE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ridwan Kamil membeli mobil Mercedes-Benz koleksi BJ Habibie dari Ilham Akbar Habibie. Untuk itu, KPK memanggil Ilham Akbar Habibie sebagai saksi dalam kasus tersebut, Selasa (30/9/2025).

Ridwan Kamil membeli mobil tersebut Rp 2,6 miliar tapi baru dibayar Rp 1,3 miliar dengan menggunakan uang dari dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB periode 2021–2023. Kemudian KPK menyita uang penjualan tersebut yang berjumlah Rp1,3 miliar, dan memutuskan mengembalikan mobil B.J. Habibie.

KPK memutuskan hal tersebut karena Ridwan Kamil baru membayar 50 persen dari total harga yang disepakati, yakni Rp2,6 miliar.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres Suhendrik (SUH), dan pengendali agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

"Pemeriksaan (Ilham Akbar Habibie) dilakukan di gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis dan tidak menjelaskan lebih detail ihwal keterangan apa yang akan dialami dari Ilham.

Pemanggilan terhadap Ilham Akbar Habibie oleh KPK ini adalah kali kedua. Sebelumnya, putra presiden BJ Habibie itu menjalani pemeriksaan pada Rabu (3/9/2025) lalu.

Saat itu, Ilham mengatakan mobil koleksi BJ Habibie itu dibeli Ridwan senilai Rp 2,6 miliar tapi baru dibayar Rp 1,3 miliar. Ilham mengungkapkan bahwa mobil tersebut dijual pada 2021 dengan harga Rp 2,6 miliar melalui skema pembayaran cicilan. Namun, hingga kini Ridwan Kamil baru membayar Rp1,3 miliar dan sisanya belum dilunasi.



Putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025). (Kumparan)

Adapun mobil merek Mercedes Benz itu tidak terdapat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Ridwan Kamil tahun 2024. Dalam laporan tersebut hanya ada ada tujuh alat transportasi yang tercatat dimiliki mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Antara lain Hyundai Santa Fe Jeep (2017), Royal Enfield Classic 500 2017 Battle Green (2017), Honda Beat Matic 108 - D1B02N2GL2 (2018), Kawasaki W175 (2019), Honda CBR Second (2019), Wuling CVT Listrik (2022), dan Vespa Matic (2022).

Sementara itu, dalam pemanggilan terhadap Ilham Akbar Habibie. KPK juga telah menyita uang Rp1,3 miliar dari putra presiden Habibie itu. Kemudian memutuskan mengembalikan mobil milik Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, yang saat ini masih berada di Bandung, Jawa Barat.

"Betul, nantinya mobil itu akan dikembalikan ke saudara IAH karena saudara IAH sudah mengembalikan, dan sudah dilakukan penyitaan, yaitu uang Rp1,3 miliar yang merupakan pembayaran yang dilakukan saudara RK kepada IAH untuk pembelian kendaraan tersebut," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir antara Selasa (30/9/2025).

Uang pembayaran yang dimaksud Budi adalah uang yang dipakai mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk membeli mobil Mercedes-Benz 280 SL atas nama B. J. Habibie, namun uang tersebut baru 50 persen dari total harga pembelian yang

disepakati antara Ridwan Kamil dengan Ilham Habibie, yakni Rp2,6 miliar.

Dia mengatakan keputusan KPK untuk menyita uang Rp1,3 miliar dan mengembalikan mobil tersebut sebagai langkah pemulihan kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023.

"Penyitaan uang Rp1,3 miliar ini juga menjadi langkah awal KPK dalam optimalisasi aset recovery (pemulihan kerugian keuangan negara, red.) dalam perkara ini, termasuk sekaligus proses atau pembuktian. Artinya, ada aliran uang dari saudara RK kepada saudara IAH untuk pembelian mobil antik tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Ilham Habibie mengatakan dirinya dipanggil KPK untuk menandatangani berita acara terkait proses pengembalian mobil miliknya.

"Jadi, beberapa atau dua minggu yang lampau, saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak kami," ujar Ilham setelah bertemu dengan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK.

KPK juga memastikan untuk memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah menyita uang Rp1,3 miliar yang dipakai untuk membeli mobil milik Presiden ke-3 RI B. J. Habibie. "Tentu nanti dilakukan



Penyitaan uang Rp1,3 miliar ini juga menjadi langkah awal KPK dalam optimalisasi aset recovery (pemulihan kerugian keuangan negara, red.) dalam perkara ini, termasuk sekaligus proses atau pembuktian. Artinya, ada aliran uang dari saudara RK kepada saudara IAH untuk pembelian mobil antik tersebut,"

BUDI PRASETYO
Juru Bicara KPK

pemanggilan dan permintaan keterangan," ujar Budi Prasetyo.

Selain itu, kata Budi, KPK mengagendakan mengonfirmasi keterangan saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023, yakni saat memeriksa Ridwan Kamil.

"Termasuk juga mengonfirmasi aset-aset yang sudah diamankan dan disita oleh KPK, baik pada saat penggeledahan ataupun aset yang disita dari pihak lainnya," katanya menambahkan.

Pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut. (ant,ist/lut)